

BANJIR, KRISIS LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN: EFEK KEKUASAAN

Haslinda B. Anriani¹, Asmirah², Harifuddin³, Rasyidah Zainuddin⁴

¹Universitas Tadulako, Palu, haslinda.tadulako@gmail.com

^{2,3}Universitas Bosowa, asmirah@universitasbosowa.ac.id.

⁴STKIP DDI Mamuju, zainuddin.rasyidah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah banjir dan krisis lingkungan sebagai efek atau konsekuensi dari pembangunan dan kekuasaan khususnya di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada pengumpulan informasi agensi melalui metode observasi lapangan, wawancara mendalam. Studi kasus terfokus pada satu masalah atau kasus hingga keseluruhan sampai tuntas. Selain wawancara mendalam dan observasi, digunakan juga studi literatur. Subjek penelitian ini adalah masyarakat umum dan jajaran pemerintah. Analisis data menggunakan Teknik tiga Langkah yaitu reduksi data, kategorisasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah (1) Efek kekuasaan pada terjadinya krisis lingkungan di Kabupaten Pangkep adalah berkontribusi secara tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan berupa pengawasan pelaksanaan pembangunan yang tidak maksimal. (2) pembangunan menimbulkan bencana banjir di Kabupaten Pangkep melalui alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan perumahan, alih fungsi lahan pertanian menjadi empang, terjadinya pendangkalan sungai akibat arus hujan yang membawa material tambang. Kesimpulan penelitian ini adalah kekuasaan pemerintah berkontribusi dalam menciptakan krisis lingkungan yang menyebabkan terjadinya banjir. Kontribusi penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pengambil kebijakan lingkungan.

Kata kunci: Bencana banjir; pemerintah; krisis lingkungan; alih fungsi

1. PENDAHULUAN

Dalam negara, kekuasaan pemerintah memiliki peran sentral dan urgen dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan terkait bidang dan wewenangnya. Kebijakan dalam bidang lingkungan selalu menjadi diskursus populer karena aspek yang berkaitan dengannya sangat banyak dan selalu terkait dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan akan berdampak baik bila mensejahterakan rakyat. Tapi bila menimbulkan kerugian bagi masyarakat dianggap kebijakan itu tidak baik. Salah satu kebijakan yang pembangunan yang pada dasarnya bagus tetapi di sisi lain menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah dan masyarakat adalah alih fungsi lahan untuk pembangunan berkelanjutan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pangkep Tahun 2005- 2016

Tahun	Alih Fungsi lahan pertanian
2005	58,985
2006	73,095
2007	83,212

2008	112,760
2009	157,983
2010	166,009
2011	188,152
2012	201,342
2013	210,331
2014	223,410
2015	301,768
2016	345,291

Sumber: BPN kabupaten Pangkep, Tahun 2017

Rentang waktu tersebut terjadi alih fungsi lahan pertanian secara massif. Pengalihan fungsi lahan ini diakibatkan karena maraknya pembangunan kompleks perumahan, untuk sektor industri, perdagangan, sarana publik lainnya dan penambahan penduduk. Pembangunan kompleks perumahan ini dikonsentrasikan di Kecamatan Pangkajene sebagai sentral kota dan Minasate'ne yang dekat dari kota kabupaten, Di kecamatan Minasate'ne terdapat pabrik semen Tonasa 2, Tonasa 3, Tonasa 4 dan Tonasa 5, dan masih banyak industri industri besar lainnya. Pada saat yang sama, alihfungsi besar-besaran berlangsung dari lahan pertanian menjadi lahan tambak atau empang yang sangat luas terutama di Kawasan kecamatan Balocci dan Kecamatan Ma'rang. Sebagian besar lahan pertanian tidak memungkinkan ditanami karena tanahnya mengandung air payau yang lebih kondusif untuk empang. Dalam perkembangannya, alih fungsi lahan ini menimbulkan bencana banjir yang berdampak luas pada Sebagian besar wilayah Pangkep. Laporan terbaru menyatakan 7 kecamatan dengan 500 buah rumah terendam dan 80 orang mengungsi (Abduh, 2023).

Laporan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, tujuh kecamatan daratan yang terendam banjir itu adalah Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Minasa Te'ne, Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Mandalle (Ronalyw, 2023). Banjir yang tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil dan nonmateril dipicu dan diperparah oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan pengelolaan lingkungan, kebijakan pembukaan lahan tambang, kebijakan alih fungsi lahan, kebijakan pembangunan perumahan, dan kebijakan rencana tata ruang (RTRW). Dalam perspektif ini, peran kekuasaan (pemerintah) sangat sentral dalam menciptakan kenyamanan dan keselarasan dengan lingkungan alam bagi masyarakatnya. Terjadinya banjir yang disebabkan oleh krisis lingkungan memperlihatkan adanya masalah dalam pemerintahan tersebut.

Kajian terkait penelitian ini telah banyak dilakukan, antara lain: (1) Penelitian tentang "Bencana Banjir dan Kebijakan Pembangunan di Kota Makassar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan lingkungan akan menimbulkan banjir yang tidak terkendali dan kerugian besar bagi masyarakat dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan (Anriani, dkk, 2018). (2) Penelitian tentang bencana alam banjir bukan hanya fenomena alam semata, tapi sangat terkait dengan ulah "kekuatan tangan manusia" yaitu akibat eksploitasi berlebihan terhadap alam di luar batas kemampuannya dan hal ini terjadi karena adanya kekuasaan yang melegalkan eksploitasi alam tersebut (Zainuddin, 2010). (3) Penelitian tentang konflik lingkungan di bukit mangunharjo tembalang: antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Penelitian ini dimotivasi oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah. Kondisi

tersebut cenderung meningkat di era otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena setiap provinsi berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya dari sumber daya alam. sumber daya alam.

Eksplorasi dilakukan tanpa diimbangi dengan pemeliharaan dan pelestarian. Akibatnya adalah degradasi lingkungan yang tidak jarang berujung pada konflik. Seperti yang terjadi di daerah perbukitan Kecamatan Mangunharjo Tembalang kota Semarang. Galian tambang galian C di lokasi tersebut memiliki konflik kepentingan. Akibat penambangan lingkungan menjadi rusak, padahal kawasan tersebut merupakan Kawasan konservasi Tembalang. Sering terjadi banjir, tanah longsor, pencemaran, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian yang menyebabkan terjadinya konflik yang sudah berlangsung beberapa tahun dan belum terselesaikan. Faktor yang berkontribusi faktor penyebabnya adalah ketidakjelasan dan kurangnya regulasi, lemahnya penegakan hukum (ketidaktegasan pemerintah), dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan (Supratiwi, 2013). Ketiga penelitian ini melihat adanya keterlibatan kekuasaan terhadap keputusan berkaitan pengelolaan lingkungan yang secara tidak langsung menjadi penyebab terjadinya banjir. Sementara penelitian ini melihat peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan perumahan sebagai penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Pangkep. Dengan demikian penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) bagaimana kekuasaan berefek pada terjadinya krisis lingkungan di Kabupaten Pangkep? (2) bagaimana pembangunan menimbulkan bencana banjir di Kabupaten Pangkep? Kontribusi penelitian ini adalah: (a) Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Pangkep, (b) Sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangkep.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Studi Kasus yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, dan multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus dapat mencakup juga bukti kuantitatif (Yin, 2014; Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini studi kasus yang dimaksud adalah kekuasaan pemerintah daerah tentang lingkungan sehingga menimbulkan dampak-dampaknya. Subjek penelitian ini adalah masyarakat umum, pemerintah dan jajarannya selaku informan. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan FGD untuk data primer, sedangkan data sekunder menggunakan website Kabupaten Pangkep (Bungin, 2014). Analisis data menggunakan Teknik tiga Langkah yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2000).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efek Kekuasaan Pada Krisis Lingkungan

Kabupaten Pangkep menduduki posisi pertama sebagai daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil survei BPS Sulsel tahun 2022, persentase angka kemiskinan dan ketimpangan di Pangkep mencapai 13,92 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkep mencapai 47,53 ribu jiwa meskipun daerah ini memiliki sumber PAD dari tambang semen secara signifikan tetapi belum bisa mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Kondisi itulah yang menyebabkan pemerintah daerah mencoba berbagai cara mendongkrak pendapatan daerah, salah satunya adalah banyak memberikan izin pembangunan industri perumahan kepada pihak swasta.

Ketika pemerintah memberikan izin pembangunan perumahan, izin tersebut melibatkan instansi lain yang berwenang seperti Dinas Cipta Karya yang berwenang terhadap tata ruang wilayah dalam hal ini apakah pembangunan perumahan sesuai rencana pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang terhadap kerusakan lingkungan dalam hal ini apakah

perumahan nantinya merusak lingkungan terutama pembuangan limbahnya dan sebagainya. Selain berurusan dengan pemerintah untuk memperoleh legalitas, paling penting juga harus ada persetujuan dari masyarakat sekitar perumahan apakah menerima pembangunan tersebut atau tidak karena hal ini berhubungan dengan ketentraman hidup dan keamanan mereka.

Namun demikian, pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta rata-rata berefek pada dampak-dampak lingkungan yang banyak merugikan masyarakat berupa bencana banjir. Hal tersebut menandakan kekurangtegasan pemerintah bidang terkait terhadap pembangunan itu. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh seorang informan bahwa:

“Banyaknya pembangunan akhir-akhir ini cenderung menyisakan banyak masalah diantaranya masalah lingkungan yang tidak kunjung selesai dan berlarut-larut. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga sering diam. Makanya kejadian ini menunjukkan ketidaktegasan pemerintah dalam mengawasi swasta” (Alwi, Ma’rang, 6 Maret 2021).

Selanjutnya, informan lain mengungkapkan:

“Kejadian ini paling tidak ada andil pemerintah yang kurang pengawasan pada sektor hilir kebijakan karena sejak dibangunnya banyak perumahan di kabupaten Pangkep ini frekuensi dan intensitas banjir semakin tinggi, apalagi Pangkep ini memang daerah banjir maka banjir tersebut telah menimbulkan bencana bahkan ada korban jiwa. Kalau kerugian materil memang sudah terjadi sejak dulu, tapi ini makin parah dan membuat masyarakat tidak tenang terutama di musim hujan” (Suhartini, Ma’rang, 6 Maret 2021).

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah yang cenderung lemah dalam mengawasi pembangunan menjadi penyebab terjadinya krisis lingkungan secara keseluruhan dan diperparah dengan sikap acuh tak acuh masyarakat terhadapnya, maka terjadilah banjir yang berkepanjangan.

3.2. Pembangunan Menimbulkan Bencana Banjir

3.2.1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan

Pertambahan penduduk dan perluasan Kawasan industri dan sarana pemerintahan berkonsekuensi pada diperlukannya lahan-lahan baru yang lebih luas. Daerah yang memenuhi syarat adalah wilayah Kecamatan Pangkajene dan Kecamatan Minasa Te’ne. kedua kecamatan ini juga bersebelahan sehingga lahannya kelihatan luas Ketika digabungkan lokasinya. Sebagai daerah pinggiran kota, kawasan ini dikelilingi banyak kawasan permukiman atau perumahan yang dibangun untuk memperluas wilayah perkotaan sekaligus mengantisipasi tempat tinggal karena terjadi pertumbuhan penduduk.

Untuk membangun kawasan perumahan ini, daerah-daerah yang semuanya merupakan lahan pertanian produktif dan non-produktif dialihfungsikan melalui skema ganti-rugi untuk kepentingan pembangunan. Hanya saja, kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan dampak yaitu bencana banjir yang parah pada beberapa titik. Hal ini terjadi karena tertutupnya sejumlah saluran besar air yang mengarah ke saluran besar atau sungai akibat timbunan lahan persawahan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh seorang informan dari Biringere:

“Pembangunan pabrik semen tonasa 3 dan 5 di Biringere tidak sederhana yang orang bayangkan hanya membuka lahan pabrik, tetapi butuh lahan yang lebih luas untuk sarana lain selain pabrik, seperti lahan perumahan, lahan mini market, lahan olahraga yang semua diperuntukkan bagi karyawan pabrik. Semua ini menggunakan lahan pertanian yang aliran airnya ditutup pembuangannya dan menimbulkan banjir” (Said, Biringere, 10 Februari 2021).

Informan lainnya juga menceritakan sebagai berikut:

“Lahan pabrik semen ini butuh lahan yang luas dan banyak lahan perkebunan jeruk te4alh ditinggalkan oleh petaninya dan beralih pekerjaan jadi pemilik empang yang lagi naik daun waktu itu. Lahan perkebunan itulah yang disulap jadi lahan perumahan. Tetapi karena posisi lahan tersebut agak tinggi, jadinya air hujan mengalir ke Kawasan di bawahnya yang lebih rendah dan terjadilah banjir genangan yang terus menerus” (Said, Biringere, 10 Februari 2021).

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan persawahan dan perkebunan menjadi penyebab sejumlah besar pemukiman warga tergenang air karena tanah di tembok dengan beton yang tidak bisa dirusak karena merusak struktur bangunan.

3.2.2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi tambak

Alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran juga terjadi karena lahan pertanian untuk tanaman padi atau tanaman lainnya tidak bisa menghasilkan apa-apa dan kurang cocok ditanami karena lahan pada sejumlah lokasi mengandung lebih banyak air garam daripada air tawar. Setelah hal tersebut berlangsung sekian lama akhirnya lahan tersebut lebih bagus dialihkan menjadi empang. Tentu saja peralihan ini menimbulkan dampak terutama banjir karena terjadi penutupan lahan. Lahan tambak memiliki cara kerja yang berbeda dengan lahan pertanian sawah, empang tidak memiliki saluran air atau got dan harus tertutup sedangkan sawah memiliki saluran air. Banyaknya lahan pertanian yang tidak fungsional sesuai peruntukannya dan akhirnya diputuskan untuk menjadikannya empang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan di Kecamatan Balocci, yaitu:

“Saya punya sawah sudah 5 tahun tidak bisa menghasilkan apa-apa, walaupun saya tanami hasilnya pasti tidak ada karena tidak berbuah padahal sudah diberi pupuk dan tumbuh hanya saja tidak berbuah. Tanaman palawija pun saya coba tapi tidak menghasilkan apa-apa dan justru kerugianlah kita derita. Kemudian kita tahu ternyata tanah di sini tidak cocok untuk pertanian malah lebih cocok untuk perikanan karena air tanah mengandung air asin” (Hasanuddin, Balocci, 5 Februari 2021).

Hal tersebut juga dipertegas oleh pegawai dinas pertanian Kabupaten Pangkep mengenai hal tersebut:

“Kami dari dinas pertanian kabupaten terutama saya secara pribadi memang sudah lama memantau keadaan tanah di sini dan ternyata benarlah teman-teman saya yang melihat potensi perikanan lebih sesuai di daerah ini dibanding potensi pertanian karena kalau diamati hanya tumbuhan khusus yang ada itupun tempat tertentu saja” (Tamrin, Balocci, 9 Februari 2021).

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perikanan sebagai penyebab banjir terutama karena tertutupnya saluran air yang ada sementara air tersebut harus terbuang ke sungai besar.

3.2.3. Pendangkalan sungai akibat pembukaan lahan tambang semen

Pembukaan lahan tambang semen juga berkontribusi besar melalui pendangkalan sungai Biringere akibat tanah bekas tambang dibawa air hujan ke sungai. Pembukaan lahan tambang terjadi melalui pembongkaran daerah pegunungan karst yang mengandung bahan baku semen dan hal tersebut kemudian menghasilkan tanah dan pasir yang tidak digunakan. Inilah yang menjadi bahan endapan dan mengalir ke sungai bersama material lain dan ini terjadi setiap hari tanpa disadari. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh masyarakat Biringere di sekitar pabrik Semen:

“Dampak yang ditimbulkan oleh pembongkaran gunung karst adalah banyaknya material pasir, batu dan tanah yang terbawa aliran hujan ke sungai sehingga lambat laun menimbulkan pendangkalan sungai. Setelah sekian lama seperti itu baru terasa sekarang akibatnya yaitu tergenangnya Sebagian sawah pertanian dengan air yang

sudah naik sampai mata kaki, padahal dulu tidak seperti ini” (Baharuddin, Biringere, 4 Maret 2021).

Pengalaman lain juga dikemukakan seorang informan berikut:

“Sebenarnya banyak cabang sungai kecil di sini yang mengalir dari atas Tondong Tallasa dan bermuara di sungai Segeri dan Sungai Pangkajene sebagai sungai induk yang menuju laut. Sekarang ini kedua sungai besar tersebut telah mengalami pendangkalan akibat banyaknya material yang terbawa ke situ, kemudian keberadaan pabrik semen yang menyisakan material tambang juga berkontribusi terhadap pendangkalan sungai. Akibatnya menimbulkan banjir besar bila terjadi hujan dengan curah yang tinggi” (Sahran, Pangkajene, 10 Maret 2021).

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendangkalan sungai menjadi salah satu penyebab banjir dan tentu saja telah banyak merugikan masyarakat Pangkep terutama merusak infrastruktur, seperti pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Banjir di Pangkep



Sumber: Abduh (detik.com.2023)

4. KESIMPULAN

Masalah-masalah lingkungan yang terjadi di Pangkep disebabkan oleh multifaktor dan salah satu dampak lingkungan yang paling dirasakan penderitanya adalah bencana banjir tiap tahun. Tampaknya masyarakat dan pemerintah telah menerima statemen bahwa daerah Pangkep merupakan daerah banjir. Pada sisi lain, bencana banjir terjadi karena terjadi krisis lingkungan dimana di Pangkep dan sebab awal yang diprediksi adalah adanya alih fungsi lahan karena terjadi pembangunan.

Terjadinya krisis lingkungan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan lingkungan pemerintah yang tidak tegas dalam mengatur dan mengawasi hingga tuntas pelaksanaan pembangunan oleh pihak pengembang atau masyarakat umum sehingga aspek-aspek lingkungan tersebut menjadi terabaikan oleh mereka dalam proyeknya. Kasus-kasus seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, alih fungsi lahan pertanian menjadi tambak, pendangkalan sungai akibat timbunan material pertambangan seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah dalam mengurai sebab musabab banjir karena masalah tersebut telah berlangsung sekian lama. Termasuk pemerintah seharusnya melakukan pengawasan

terhadap pelaksana pembangunan hingga terakhir dan melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas hasil pembangunan tersebut.

REFERENSI

- Abduh, Muhlis. 2023. *Banjir Rendam 7 Kecamatan di Pangkep, 80 Orang Mengungsi* Diakses 14 Mei 2023 di <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6568123/banjir-rendam-7-kecamatan-di-pangkep-80-orang-mengungsi/diakses14Mei2023>
- Anriani, Haslinda B., Arifin, Ansar, Halim, Harifuddin, Zainuddin, Rasyidah, Iskandar, Abdul Malik. 2018. *Bencana Banjir dan Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kota Makassar. Dalam Prosiding Talenta Conference Series*. Local Wisdom, Social and Arts (LWSA). Volume 2 No. 1. 2019 pada Konferensi Nasional Sosiologi VIII, Medan 1 April 2019.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Kencana Prenada Media.
- Miles, Mathew dan Huberman, Michael B. 2000. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Metode Baru*. Penerjemah, Tjetjep Rohendi, Jakarta; UI Press.
- Ronalyw. 2023. *Tujuh Kecamatan Daratan di Pangkep Terkepung Banjir*, Diakses 14 Mei 2023 di <https://beritakotamakassar.com/berita/2023/02/14/tujuh-kecamatan-daratan-di-pangkep-terkepung-banjir/diakses14Mei2023>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Supratiwi. 2013. *Konflik Lingkungan di Bukit Mangunharjo Tembalang: Antara Kepentingan Ekonomi dengan Kepentingan Lingkungan*. (POLITIKA, Vol. 4, No. 1).
- Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA; Sage.
- Zainuddin, Sulthan. 2010. *Kontestasi Kekuasaan dalam Pengelolaan SDA*. (Jurnal Academia, Vol. 2 No. 2).